



RESHUFFLE... TIDAK... RESHUFFLE...

DUA MENTERI, MENTERI PERUMAHAN RAKYAT DAN MENTERI PERTANIAN, MEMILIKI RAPOR MERAH. DUA-DUANYA MEMBANDEL BAGI KOALISI. MEREKA BERADA DI UJUNG TANDUK RESHUFFLE KABINET.

Reporter: Aryo Bhawono
Foto: DETIKFOTO

SUDAH sejak bulan Oktober 2012 lalu Djan Faridz bolak-balik menemui Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ia resah terbelit dua masalah, rapor merah kinerja sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) dan mendukung Jokowi-Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta. Alasan pas bagi presiden untuk mendepaknya dari kabinet.

Setumpuk berkas laporan kinerja triwulan kementerian mengawali keresahannya. Laporan ini dibuat oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kementerian yang dipimpinnya sejak Oktober 2011 lalu tak mencapai 50%, prestasinya jeblok.

Tak hanya itu, sinisme politik mulai ia rasakan dari istana. Gara-garanya, dukungan kepada Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Padahal, koalisi politik nasional mendukung Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara).

“Jadi SBY tidak terlalu suka karena dia mendukung Jokowi. Apalagi kemudian Jokowi menang,” ungkap sumber **majalah detik**.

Resah ini semakin memuncak ketika mendekati akhir tahun 2012. Kamis 27 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan kabinetnya di Kantor Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. UKP4 dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sudah siap membeberkan evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II).

Mudah disangka, prestasi Djan jeblok di akhir tahun. Informasi yang diterima **majalah detik** menyebutkan serapan anggaran Kemenpera kurang dari 65% pada Evaluasi Akhir Tahun Kinerja KIB II Tahun 2012. Kinerja kementeriannya jauh dari kata efektif.

Djan tak sendirian, permasalahan akut juga melilit menteri dari PKS, Suswono. Menteri Pertanian ini juga



Jadi SBY tidak terlalu suka karena dia mendukung Jokowi. Apalagi kemudian Jokowi menang





Menteri Sekretaris Kabinet,
Sudi Silalahi
DETIKFOTO

memiliki kinerja seperti Djan, buruk. Apalagi PKS terlihat 'bandel' ketika mengawal kebijakan pemerintah di parlemen.

PKS memang mencatat prestasi buruk di tengah koalisi. Partai ini menelikung koalisi dalam rapat paripurna DPR kenaikan BBM pada akhir Maret 2012. Mereka menolak tawaran pemerintah untuk menaikkan harga BBM akibat meningkatnya harga minyak dunia.

"Jadi ada dua menteri, satu dari PPP karena dukungan kepada Jokowi. Satu lagi PKS karena sudah saatnya sanksi koalisi dijatuhkan," imbuh sumber **majalah detik**.

Buruknya kinerja menteri memang tercatat dalam rapat tersebut. Menteri Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi menyebutkan terdapat beberapa kementerian yang memiliki nilai evaluasi kinerja di bawah 65%. Soal serapan anggaran belum dibuka dalam rapat.

Sudi mengaku, evaluasi ini tidak melulu soal *reshuffle* kabinet. Anggota KIB II sendiri belum memberikan penjelasan atas hasil evaluasi ini. Rencananya pada Januari, menteri akan memberikan jawaban atas evaluasi ini.

"Belum sampai perombakan (kabinet), aspek evaluasi dari UKP4 dan Wantimpres. Nanti menteri diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban," jelasnya.

Pengakuan Sudi ini tak padu dengan Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto. Kuntoro tak mengakui melakukan penilaian secara keseluruhan. Evaluasinya hanya berkisar pada hal-hal pokok.

UKP4 masih berpikir positif terhadap kinerja menteri. Semua bekerja maksimal, hanya saja capaian tak seperti yang diharapkan.

Jawaban melegakan hadir dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kamis 4 Januari 2013, pengumuman *reshuffle* langsung keluar dari mulut presiden. Tidak ada *reshuffle*.

Kanan: Djan Faridz, Menteri
Perumahan Rakyat
Kiri: Suswono

DETIKFOTO



“Supaya ada kepastian saya tidak menjamin memang apakah sampai tahun 2014 tidak ada *reshuffle* atau penataan kembali. Saya tidak harus mengatakan sekarang ini tapi yang jelas sekarang ini tidak ada *reshuffle* dan harapan saya bisa bekerja penuh,” katanya.

Kesempatan *reshuffle* adalah penilaian tahunan UKP4 dan pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng karena kasus dugaan korupsi pembangunan kompleks pusat pendidikan olahraga Hambalang. Presiden memastikan, jatah ini tetap diberikan untuk Partai Demokrat.

Tertutupnya hasil evaluasi UKP4 ini memunculkan spekulasi politik atas *reshuffle* kabinet. Harusnya mandat terhadap UKP4 terbuka untuk publik. Sehingga hak istimewa presiden, hak prerogatif, untuk menunjuk menteri tidak dispekulasikan macam-macam.

Sikap presiden untuk bertahan dengan komposisi menteri ini memang menuai kritik. Pengamat Politik UI Andrinof Chaniago menganggap evaluasi UKP4 tak dimanfaatkan untuk menyikapi kabinet. Jika memang ada rapor merah, seharusnya ada *reshuffle*.

Memang, waktu pemerintahan hanya tersisa 1,5 tahun. Namun waktu ini masih cukup panjang bagi menteri baru untuk bekerja maksimal daripada mempertahankan kinerja buruk. “Soal risiko negatif politik itu selalu ada. Nah, dalam konteks ini kalau mau *reshuffle*, ya lakukan saja,” tandasnya. (ARY/YOG)